

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun periode pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Analisis isu-isu strategis diidentifikasi berdasarkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang sangat mendesak dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan serta disusun berdasarkan isu strategis yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang yang akan muncul dalam 5 (lima) tahun mendatang, termasuk mengantisipasi berbagai ancamannya.

Pernyataan isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan karena pengaruhnya yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada 5 (lima) tahun mendatang. Isu-isu strategis adalah isu-isu yang jika diprioritaskan penanganannya maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan 5 (lima) tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti. Jika isu strategis ini tidak ditangani maka tujuan dan sasaran menjadi sulit tercapai. Review terhadap RPJPD Kabupaten Pacitan menunjukkan bahwa arah kebijakan pembangunan jangka panjang adalah:

1. Arah kebijakan pada misi Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, Mandiri, Berakhlak Mulia dan Berbudaya, meliputi:
  - a. Pembangunan Pendidikan;
  - b. Pembangunan Kesehatan;
  - c. Pembangunan Kependudukan;
  - d. Pembangunan Ketenagakerjaan;
  - e. Pembangunan Kesejahteraan Sosial;
  - f. Pembangunan Pemuda dan Olahraga;
  - g. Pemberdayaan Perempuan;
  - h. Pembangunan dan Pemantapan Jatidiri Bangsa;
  - i. Penanggulangan Kemiskinan;
  - j. Pembangunan Kehidupan Beragama; dan
  - k. Pengembangan Kebudayaan.

2. Arah kebijakan pada misi Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang didukung oleh Industri Berbasis Pertanian (Agroindustri), Kelautan dan Pariwisata, meliputi:
  - a. Penguatan Struktur Perekonomian;
  - b. Penguatan Struktur Industri;
  - c. Revitalisasi Pertanian;
  - d. Peningkatan Ketahanan Pangan;
  - e. Peningkatan Investasi dan Perdagangan;
  - f. Peningkatan Daya Saing Pariwisata;
  - g. Peningkatan Daya Saing Industri;
  - h. Pengembangan Potensi Sumber Daya Kelautan;
  - i. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM; dan
  - j. Optimalisasi Peran Lembaga Keuangan dan Perbankan.
3. Arah kebijakan pada misi Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas dalam Mewujudkan Aktifitas Ekonomi yang Stabil, meliputi:
  - a. Pembangunan Transportasi;
  - b. Pengelolaan Sumber Daya Air;
  - c. Pembangunan Perumahan dan Permukiman;
  - d. Pengembangan Wilayah;
  - e. Penyelenggaraan Penataan Ruang; dan
  - f. Pembangunan Sistem Informasi dan Komunikasi.
4. Arah kebijakan pada misi Mewujudkan Suasana Aman dalam Kehidupan Politik, Hukum, Ekonomi, dan Sosial Budaya, meliputi:
  - a. Penyempurnaan Struktur Politik;
  - b. Peningkatan Kualitas Proses Politik;
  - c. Peningkatan Peranan Komunikasi dan Informasi;
  - d. Penataan Peran Pemerintah dan Masyarakat; dan
  - e. Pembangunan Keamanan dan Ketertiban.
5. Arah kebijakan pada misi Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Alam yang Berwawasan Lingkungan, meliputi:
  - a. Pendayagunaan Sumber Daya Alam (SDA) Terbarukan;
  - b. Pendayagunaan Sumber Daya Alam Tak Terbarukan;
  - c. Pengembangan Energi;
  - d. Pemantapan Kawasan Lindung;

- e. Peningkatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
  - f. Peningkatan Konservasi di Kawasan Budidaya;
  - g. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
  - h. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
  - i. Peningkatan Kesadaran Masyarakat untuk Mencintai Lingkungan Hidup; dan
  - j. Penanganan Bencana.
6. Arah kebijakan pada misi Mewujudkan Pemerintahan yang Berkualitas, Berlandaskan Prinsip-prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*, meliputi:
- a. Pembangunan Hukum;
  - b. Penyelenggaraan Pemerintahan;
  - c. Pembangunan Politik;
  - d. Pembangunan Komunikasi dan Informasi;
  - e. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur; dan
  - f. Pembangunan Keuangan Daerah.

Kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Pacitan yang akan dituangkan ke dalam RPJMD harus konsisten dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang yang tercantum dalam RPJPD. Dengan demikian maka kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun yang akan datang perlu memastikan dilaksanakannya arah kebijakan pembangunan jangka panjang tersebut, yang menekankan pada upaya perbaikan secara berkesinambungan terhadap:

- a. Penanganan kemiskinan;
- b. Pengelolaan sumber daya alam;
- c. Aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan;
- d. Akses masyarakat terhadap fasilitas dan pelayanan publik;
- e. Peningkatan infrastruktur dasar;
- f. Akses masyarakat terhadap air bersih; dan
- g. Penanganan kawasan rawan bencana.

Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis untuk masing-masing aspek dan urusan, serta kesepakatan dari para pemangku kepentingan maka permasalahan pembangunan dan isu strategis jangka menengah Kabupaten Pacitan dijelaskan pada sub bab berikut ini:

#### 4.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan Kabupaten Pacitan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dilakukan. Guna membantu memastikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati telah dirumuskan dengan tepat, dibutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi Kabupaten Pacitan.

Permasalahan pembangunan diperlukan dalam perumusan tujuan pembangunan lima tahunan, yang selanjutnya akan dituangkan dalam perumusan sasaran RPJMD. Identifikasi permasalahan pembangunan dapat diverifikasi dari informasi pada gambaran umum daerah dan sumber informasi lainnya yang relevan.

Dalam upaya percepatan pembangunan di segala bidang masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi Kabupaten Pacitan, antara lain:

##### **1. Rendahnya kualitas dan akses pendidikan**

Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Pacitan yang ditandai dengan angka rata-rata lama sekolah yang masih berkisar pada angka 6 (enam) tahun hal ini menggambarkan bahwa penduduk kabupaten Pacitan rata-rata baru tamat SD.

Angka Partisipasi Kasar pada semua tingkat pendidikan menunjukkan capaian yang cukup baik, terutama pada tingkat SD/MI yang berjumlah 103,11%. Dari semua tingkat pendidikan, yang memiliki capaian rendah yaitu pada tingkat PAUD yang baru mencapai 52,63%. Sedangkan pada tingkat SMP/MTs sudah mencapai jumlah 97,34% dan SMU/SMK/MA berjumlah 68,35%.

##### **2. Kurangnya sarana prasarana pelayanan medis**

Kesehatan merupakan salah satu hak dasar masyarakat. Di Kabupaten Pacitan sarana prasarana pelayanan medis masih kurang yaitu ditandai dengan hanya tersedianya satu unit Rumah Sakit (RS) untuk melayani seluruh masyarakat Kabupaten Pacitan. Selain itu masih banyaknya pasien golongan menengah ke atas yang

lebih percaya pada rumah sakit di kabupaten/kota tetangga untuk berobat, merupakan tantangan tersendiri bagi Kabupaten Pacitan untuk menyediakan kualitas pelayanan yang maksimal sehingga seluruh lapisan golongan masyarakat dapat terlayani kesehatannya di Kabupaten Pacitan.

### **3. Banyaknya kondisi jalan yang rusak**

Prasarana Transportasi adalah salah satu prasarana yang sangat penting dan vital untuk mobilitas penduduk dan memperlancar arus lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain. Kondisi Kabupaten Pacitan yang berbukit dan bergunung menyebabkan pembangunan sarana perhubungan seperti jalan dan jembatan banyak mengalami kendala. Sehingga hal ini mengakibatkan pertumbuhan daerah-daerah pinggiran dan pelosok pedesaan Kabupaten Pacitan lambat berkembang. Kondisi prasarana infrastruktur Kabupaten Pacitan saat ini masih belum memadai ditandai dengan banyaknya jalan yang berlubang dan rusak yang mengindikasikan betapa belum maksimalnya pelayanan infrastruktur jalan di Kabupaten Pacitan, dengan kondisi jalan aspal yang rusak ringan pada tahun 2010 sebesar 20,82% dan kondisi rusak berat berjumlah 18,45%.

### **4. Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan sanitasi dan kesehatan lingkungan**

Pengetahuan dan kesadaran masyarakat Kabupaten Pacitan terhadap kesehatan dasar masih rendah, hal ini ditandai dengan masih adanya rumah yang belum memiliki jamban sendiri pada Tahun 2010 sebesar 22,93% dan rumah yang belum memiliki sanitasi sebesar 23,44%. Selain itu secara umum cakupan layanan kebersihan di Kabupaten Pacitan mengalami kondisi yang kurang maksimal hal ini disebabkan perkembangan volume sampah di Kabupaten Pacitan yang sangat pesat sehingga perkembangan infrastruktur persampahan tidak dapat memenuhi.

### **5. Belum optimalnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Belum optimalnya peningkatan PAD ditandai dengan pendanaan pembangunan Kabupaten Pacitan masih mengandalkan bantuan keuangan dari pemerintah pusat dalam bentuk Dana Perimbangan, diharapkan ke depan lebih mengoptimalkan sumber-sumber PAD.

Isu-isu strategis selain berasal dari permasalahan pembangunan sebagaimana telah diuraikan sub bab di atas, juga berasal dari analisis lingkungan eksternal. Di samping harus mampu menciptakan peluang, sekaligus harus mampu memanfaatkan berbagai peluang yang akan muncul dalam 5 (lima) tahun mendatang, termasuk mengantisipasi berbagai ancamannya. Isu strategis, apabila tidak diantisipasi maka akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, demikian pula sebaliknya jika tidak dimanfaatkan akan dapat menghilangkan peluang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Analisis lingkungan eksternal dapat diambil dari berbagai informasi dari dunia internasional (MDG's), kebijakan nasional dan regional serta sumber-sumber lain yang dapat berdampak langsung pada pembangunan Kabupaten Pacitan selama 5 (lima) tahun kedepan. Isu-isu strategis yang menjadi dasar perencanaan pembangunan di Kabupaten Pacitan, meliputi:

### 1. Isu Internasional

Isu strategis internasional yang perlu mendapat perhatian yang berdampak bagi pengembangan dan pembangunan Kabupaten Pacitan dalam 5 (lima) tahun mendatang antara lain Komitmen *Millenium Development Goals* (MDG's) yang ditetapkan pada UN Summit tahun 1990 oleh PBB. Dengan telah diadopsinya komitmen MDG's oleh Pemerintah Indonesia, maka Kabupaten Pacitan wajib menindaklanjuti indikator dan target yang harus dicapai sampai akhir tahun 2015 untuk setiap tujuan pembangun millenium tersebut. Capaian-capaian penting itu menyangkut tujuan pembangunan penanggulangan kemiskinan dan kelaparan, pencapaian pendidikan dasar untuk semua, peningkatan persamaan gender dan pemberdayaan kaum wanita, penurunan angka kematian anak, peningkatan kesehatan ibu, memerangi penyakit HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya, dan memastikan keberlangsungan lingkungan (*environmental sustainability*).

### 2. Isu Nasional dan Regional

Penentuan isu strategis di tingkat nasional dan regional dimaksudkan untuk sinkronisasi dan menjamin tujuan pembangunan nasional dan

regional telah didukung dan dilaksanakan oleh Kabupaten Pacitan. Kebijakan tersebut menjadi pertimbangan dalam perencanaan pembangunan, yaitu:

- **Masih tingginya angka kemiskinan**

Dalam upaya percepatan pembangunan di segala bidang masih terdapat beberapa kendala, antara lain masih tingginya angka penduduk miskin. Kabupaten Pacitan masih tergolong tinggi dikarenakan angka tersebut masih berada di atas angka kemiskinan nasional, namun selama 4 (empat) tahun terakhir jumlah penduduk miskin mengalami penurunan yaitu pada tahun 2006 mencapai 26,94% dan menurun menjadi 24,74% pada tahun 2007. Pada tahun 2008 sebesar 21,17%, tahun 2009 sebesar 19,01% dan jumlah penduduk miskin pada tahun 2010 menjadi 19,50% atau 102.767 jiwa.

- **Kebijakan Minapolitan**

Kebijakan nasional minapolitan yang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2010, merupakan konsep manajemen pengembangan kawasan berbasis kelautan dan perikanan. Kawasan minapolitan terbagi menjadi minapolitan budidaya, minapolitan tangkap dan minapolitan garam.

Di Provinsi Jawa Timur, ditetapkan 7 (tujuh) kabupaten/kota yang menjadi minapolitan tangkap, selain minapolitan budidaya dan minapolitan garam sampai dengan tahun 2014. Salah satu kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai minapolitan tangkap adalah Kabupaten Pacitan, dengan pertimbangan potensi perikanan tangkap yang dimiliki oleh Kabupaten Pacitan.

- **Jalur Lintas Selatan(JLS)**

Sehubungan dengan rencana pembangunan jalur transportasi lintas selatan jawa, maka Kabupaten Pacitan akan memiliki posisi strategis sebagai kota penghubung antarkota. Posisi Kabupaten Pacitan bersama dengan Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Gunung Kidul akan menjadi penting sebagai kota yang dilewati oleh lintas selatan jawa. Untuk menunjang kebijakan ini, maka pada tahun 2010 sudah mulai dilakukan pembangunan terminal Tipe A yang akan digunakan

sebagai terminal antar kota dan disinergikan dengan pembangunan jaringan Jalur Lintas Selatan Pulau Jawa.

- **Pelabuhan barang dan niaga**

Dalam rangka meningkatkan aktivitas niaga di pelabuhan pada wilayah Jawa Timur, maka pemerintah menempuh salah satu kebijakan untuk membangun pelabuhan barang dan niaga rintisan di Kabupaten Pacitan. Kebijakan ini ditempuh untuk menangkap peluang dan potensi niaga yang cukup besar dan belum dioptimalkan di wilayah selatan pulau jawa.

Dengan membangun pelabuhan niaga rintisan tersebut, diharapkan aktivitas niaga di Jawa Timur dan sekitarnya tidak hanya terkonsentrasi di Surabaya dan Semarang. Pembangunan pelabuhan niaga rintisan ini nantinya akan menjadi salah satu titik alternatif bagi aktivitas niaga.

### **3. Isu strategis Kabupaten Pacitan**

Selain beberapa isu-isu strategis yang telah dikemukakan di atas sebagai aspek eksternal (internasional, nasional dan regional) yang mempengaruhi Kabupaten Pacitan, terdapat juga beberapa isu strategis yang berasal dari wilayah Kabupaten Pacitan, meliputi:

- **Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam**

Lahan kritis di Kabupaten Pacitan pada tahun 2012 mencapai 21.207 Ha dari luas wilayah. Kondisi ini bila tidak dikelola dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan arealnya akan bertambah. Berdasarkan fungsi kawasan di Kabupaten Pacitan yang terbagi atas 2 (dua) kawasan yaitu kawasan budi daya dan kawasan lindung. Kawasan budi daya yang terdiri dari kawasan hutan produksi, kawasan pertanian tanaman pangan, kawasan lahan kering, kawasan perikanan, kawasan perkebunan, kawasan peternakan, kawasan pariwisata, kawasan permukiman, kawasan perindustrian, kawasan pertambangan, kawasan khusus, kawasan prioritas. Sedangkan Kawasan lindung yang meliputi kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan kawasan hutan lindung yang senantiasa dikawal dengan kegiatan yang diarahkan untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam tidak merusak



keseimbangan alam sehingga kelestarian lingkungan hidup dapat terjaga.

- **Masih rendahnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan**

Berdasarkan teori ekonomi, salah satu sumberdaya pembangunan yang sangat penting adalah sumber daya manusia (SDM). Sebagai salah satu faktor produksi, kualitas SDM akan sangat mempengaruhi output/produksi suatu perekonomian, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Salah satu jalan untuk meningkatkan kualitas SDM adalah pendidikan dan peningkatan pelayanan kesehatan. PBB sudah menetapkan Millenium Development Goals (MDGs) yang salah satunya adalah semangat untuk mengurangi jumlah kemiskinan dan pengangguran serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan yang layak serta peningkatan daya beli. Komitmen untuk terus meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan diwujudkan dengan penerapan kebijakan di bawah ini:

- a. Peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan
- b. Peningkatan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan

- **Masih terbatasnya akses masyarakat terhadap fasilitas dan pelayanan publik**

Hingga sekarang ini kualitas pelayanan publik masih diwarnai oleh pelayanan yang kurang dapat diakses, prosedur yang panjang, biaya yang tidak jelas, merupakan indikator rendahnya kualitas pelayanan publik di Kabupaten Pacitan. Di mana hal ini juga sebagai akibat dari berbagai permasalahan pelayanan publik yang belum dirasakan optimal oleh rakyat.

Pada dasarnya pemerintah telah melakukan berbagai upaya agar menghasilkan pelayanan yang lebih cepat, tepat, manusiawi, murah, tidak diskriminatif, dan transparan. Selain itu pemerintah telah mengeluarkan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, namun upaya-upaya yang telah ditempuh oleh pemerintah nampaknya belum optimal. Salah satu indikator yang dapat dilihat dari fenomena ini adalah pada fungsi pelayanan publik yang banyak dikenal dengan sifat birokratis dan banyak mendapat keluhan dari

masyarakat karena masih belum memperhatikan kepentingan masyarakat penggunaanya. Masyarakat yang seharusnya menjadi pengontrol pemerintah, belum bisa menjalankan fungsinya dengan maksimal. Pemahaman masyarakat terhadap UU Pelayanan Publik dinilai masih minim. Dengan demikian reformasi birokrasi dan pelayanan publik tetap diperlukan agar dapat mengantisipasi perubahan lingkungan, paradigma dan kemajuan teknologi.

- **Optimalisasi Sumber-sumber pendanaan pembangunan**

Belum optimalnya peningkatan PAD ditandai dengan pendanaan pembangunan Kabupaten Pacitan masih mengandalkan bantuan keuangan dari pemerintah pusat dalam bentuk Dana Perimbangan. Diharapkan ke depan lebih mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan lainnya serta mampu meningkatkan pengelolaan sumber daya wilayah yang dimiliki untuk mendatangkan pemasukan bagi daerah. Dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan pembangunan lainnya, disadari bahwa pemerintah daerah tidak dapat membebani masyarakat dan dunia usaha dengan retribusi dan pajak yang terlalu memberatkan. Perlu kebijakan dan strategi peningkatan PAD yang lebih efektif.

- **Masih kurang memadainya kondisi infrastruktur**

Keberadaan sarana dan prasarana infrastruktur yang baik mutlak sangat diperlukan dalam pembangunan daerah, sehingga akses informasi dan komunikasi serta distribusi barang dan jasa dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat karena semua masyarakat mempunyai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang serta maju bersama sehingga dapat mengurangi tingkat kesenjangan antar wilayah. Kondisi peningkatan prasarana jalan di Kabupaten Pacitan selama tahun 2006 s/d 2010 cukup baik. Hal ini dapat dilihat pada peningkatan panjang jalan per tahun. Selama tahun 2006 s/d 2007 peningkatan panjang jalan kabupaten berkisar antara 32,1%, pada tahun 2008 s/d 2012 tidak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Namun demikian kondisi jalan tersebut semakin menunjukkan penurunan. Peningkatan panjang jalan tidak diimbangi dengan peningkatan kondisi jalan yang ada. Selama tahun 2006 s/d 2010, kondisi jalan

sedang dan rusak berat bertambah. Hal ini harus segera diantisipasi agar tidak sampai mengganggu kelancaran distribusi barang jasa dan faktor-faktor produksi. Pada realisasi 2011 dan 2012, panjang jalan masih sama dengan tahun dasar 2010, akan tetapi kondisi jalan menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Kondisi jalan pada tahun 2006 s/d 2012 adalah sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel. T-IV.1  
Kondisi Jalan Kabupaten Tahun 2006 s/d 2012

NO	URAIAN	PANJANG JALAN (M)						
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Kondisi Jalan Baik	287.354	308.672	350.841	376.410	395.648	400.840	407.858
2	Kondisi Rusak Ringan	123.185	132.361	126.024	185.950	166.153	177.818	187.657
3	Kondisi Rusak Berat	193.588	356.967	321.135	235.640	236.199	219.342	202.485
	a. Aspal	147.308	267.082	238.690	148.331	147.244	131.915	116.586
	b. Makadam	46.280	81.030	74.090	80.014	83.042	82.353	81.663
	c. Tanah	-	8.855	8.355	7.295	5.913	5.074	4.236
	Jumlah	604.127	798.000	798.000	798.000	798.000	798.000	798.000

Sumber Data : Dinas Bina Marga dan Pengairan Kab.Pacitan

- Masih terbatasnya akses masyarakat terhadap air bersih**

Kekeringan yang melanda di wilayah sebagian Kabupaten Pacitan sebenarnya bukan sesuatu yang datang dengan tiba-tiba. Artinya jauh-jauh hari keadaan itu bisa diprediksi. Keseimbangan air yang membandingkan antara kebutuhan dan ketersediaan air tidak mencukupi atau tidak imbang. Kebutuhan air untuk rumah tangga, industri dan pertanian semakin hari semakin meningkat seiring pertambahan penduduk dan peningkatan aktifitas perekonomian. Mau tidak mau, penanganan Kabupaten Pacitan yang telah mengalami krisis penyediaan air minum atau air bersih melalui intervensi infrastruktur dan kegiatan terkait harus mendapat prioritas.

- Terdapatnya Kawasan Rawan Bencana Alam**

Bencana alam merupakan kejadian luar biasa yang sulit untuk diprediksi. Namun demikian sudah menjadi tugas dan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan penanganan dan penanggulangan pra dan pasca bencana. Kabupaten Pacitan yang tergolong sebagai kawasan rawan bencana terbagi atas 4 (empat) jenis kawasan, yaitu:

a. Kawasan rawan gempa bumi

Daerah Kabupaten Pacitan yang berada di atas lempeng India-Australia kondisinya saat ini sangat rapat karena mendapat tekanan dari lempeng Eropa-Asia. Kondisi lempeng Jawa Selatan yang rapat dan tertekan itu sewaktu-waktu bisa patah sehingga menimbulkan gempa. Berdasarkan realita tersebut maka seluruh wilayah Kabupaten Pacitan masuk dalam kawasan rawan bencana gempa bumi.

b. Kawasan rawan tanah longsor/gerakan tanah

Adapun kawasan rawan tanah longsor/gerakan tanah di Kabupaten Pacitan merupakan daerah yang memiliki kemiringan lahan lebih dari 40% dan kawasan yang memiliki jenis tanah Redzina dan litosol. Pada kawasan yang memiliki kriteria tersebut penggunaan lahan sedapat mungkin berupa hutan lindung/hutan rakyat. Daerah yang termasuk kedalam kawasan tanah longsor adalah Kecamatan Arjosari (Desa Mangunharjo dan Desa Temon), Kecamatan Tegalombo (Desa Kebondalem, Desa Ngreco, Desa Tegalombo, Desa Puncangombo bagian Utara, dan Desa Gedangan), Desa Sendang Kecamatan Donorojo, dan Desa Sidoharjo Kecamatan Pacitan.

c. Kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami

Tsunami merupakan gelombang pasang yang disebabkan oleh gempa bumi atau longsor di lereng dasar laut. Gelombang pasang semacam ini bisa melanda daerah pantai sampai puluhan meter tingginya dan ratusan hingga ribuan meter jauhnya dari pantai, sehingga menyapu dan merusak segala apa yang ada di pantai dan di daratan.

Kabupaten Pacitan terletak di jalur gempa tektonik yang pada akhirnya akan menimbulkan tsunami memanjang di sepanjang pantai selatan Jawa. Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa pantai Selatan Kabupaten Pacitan merupakan kawasan rawan bencana tsunami tinggi. Untuk itu penggunaan dan pengembangan lahan di sepanjang pantai Kabupaten Pacitan harus direncanakan sedemikian rupa agar dapat meminimalkan dampak yang akan terjadi jika ada tsunami.

Wilayah kecamatan yang merupakan kawasan rawan bencana tsunami adalah wilayah pantai di bagian selatan Kecamatan Donorojo, Kecamatan Pringkuku, Kecamatan Pacitan, Kecamatan Kebonagung, Kecamatan Tulakan, Kecamatan Ngadirojo dan Kecamatan Sudimoro Lokasi yang diarahkan penggunaan lahannya sebagai bahaya I tsunami adalah seluruh pantai yang terletak di Kabupaten Pacitan bagian selatan dengan kemiringan lahan yang landai sekitar 0-15%.

d. Kawasan rawan banjir

Bahaya bencana banjir selain merupakan bahaya bencana yang disebabkan oleh proses alamiah siklus air, juga banyak dipengaruhi oleh perbuatan manusia dalam mengolah alam dan sumberdayanya yang menyebabkan keseimbangan ekosistem dan alam menjadi tidak stabil. Salah satu penyebab terjadinya banjir yang terjadi di wilayah Kabupaten Pacitan adalah adanya perilaku merusak (*vandalism*) yang dilakukan oleh manusia antara lain pengrusakan hutan, kawasan penyangga dan daerah aliran sungai mengakibatkan siklus air yang secara alami terjadi menjadi tidak seimbang antara *run off* dan serapan serta antara hulu dan hilir yang mengakibatkan bencana banjir dan juga tanah longsor.

Titik-titik rawan kejadian banjir di wilayah Kabupaten Pacitan sangat erat kaitannya dengan keberadaan sungai - sungai utama yang ada yaitu Sungai Baksoko, Sungai Lorog, Sungai Pagotan, Sungai Bawur dan terutama Sungai Grindulu. Daerah yang masuk kedalam kawasan rawan banjir adalah sebagian wilayah Kecamatan Arjosari, Pacitan dan Kebonagung. Saat ini penggunaan lahan di kawasan rawan banjir di Kabupaten Pacitan adalah sebagai kawasan permukiman. Penggunaan lahan di Kawasan yang rawan banjir direncanakan tidak akan berubah, namun untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya banjir adalah dengan meningkatkan luasan ruang hutan kota dan kawasan terbuka hijau, terutama di daerah hulu, guna meningkatkan penyerapan air hujan kedalam tanah dan meminimalkan air limpasan (*run off*), serta dengan melakukan pengembangan sistem prasarana drainase. Pemerintah

Kabupaten Pacitan belum mempunyai standar penanganan bencana yang diatur dalam peraturan daerah atau peraturan bupati. Agar penanganan bencana dapat lebih efektif, maka perlu dibuat suatu standar penanganan bencana yang ditetapkan dalam peraturan daerah yang ditindaklanjuti dengan peraturan bupati.